## DINILAI TIMBULKAN KERUGIAN MATERIL DAN IMATERIL, OMBUDSMAN SAMPAIKAN 5 POIN DALAM PENANGANAN BANJIR DI JATENG

Kamis, 25 Februari 2021 - Bellinda Wasistiyana Dewanty

SINARJATENG.COM - Ombudsman RI Perwakilan Jateng meminta keterangan pemerintah daerah terkait penanganan dampak banjir di wilayah Jawa Tengah.

Hal ini dilakukan Ombudsman sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada <u>publik</u> bahwa keberadaannya sebagai lembaga pengawas penyelenggara <u>pelayanan</u> memiliki kewajiban untuk menagih komitmen penyelenggara dalam menjamin hak setiap warga.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jateng, Siti Farida menyampaikan, setidaknya terdapat 5 (lima) poin penting yang disampaikan Ombudsman kepada Gubernur Jawa tengah dan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).

OPD terkait yakni Bagian Organisasi <u>Kota Semarang</u>, BPBD <u>Kota Semarang</u>, Dinas Pekerjaan Umum <u>Kota Semarang</u>, Dinas Kesehatan <u>Kota Semarang</u>, <u>Diskominfo</u> <u>Kota Semarang</u> dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak <u>Kota Semarang</u>.

Lima point tersebut yakni Pertama, Penanganan<u>banjir</u> di Jawa Tengah merupakan hal yang serius dan dibutuhkan keseriusan pula dalam menangani dampak tersebut. "Oleh karenanya, sinergitas dan komitmen Pemerintah Provinsi (<a href="Pemprov">Pemprov</a>) Jawa Tengah dan Pemerintah Kota (<a href="Pemkot">Pemkot</a>) Semarang memiliki peranan penting," katanya.

Kedua, dalam penanganan dampak <u>banjir</u>, <u>Pemprov</u> Jawa Tengah dan Pemerintah <u>Kota Semarang</u> wajib memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat. "Pemerintah wajib memperhatikan kualitas makanan yang didistribusikan kepada warga terdampak, fasilitas kesehatan dan tempat penampungan yang telah memenuhi protokol kesehatan bagi warga terdampak <u>banjir</u>," ujarnya.

Ketiga, penanganan dampak <u>banjir</u> juga wajib memperhatikan pengguna kebutuhan khusus, perempuan, anak, lansia dan disabilitas.

Keempat, <u>Pemprov</u> Jawa Tengah dan Pemerintah <u>Kota Semarang</u> wajib membuka saluran khusus pengelolaan pengaduan bagi warga terdampak <u>banjir</u> serta bertindak cermat dan tidak berlarut-larut dalam menindaklanjutinya.

Kelima, dalam hal masyarakat mengalami kerugian materil/imateril atas penyelenggaraan <u>pelayanan</u> <u>publik</u>, khususnya terkait permasalahan <u>banjir</u>,

<u>Pemprov</u> Jawa Tengah dan <u>Pemkot</u> Semarang wajib melakukan telah berupa ganti kerugian. Hal ini memperhatikan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang <u>pelayanan</u> <u>publik</u>. "Penyelenggara wajib menyediakan anggaran guna membayar ganti rugi," imbuhnya.

Sebagai bentuk kerja sama yang baik antara <u>Ombudsman RI Perwakilan Jateng</u> dengan <u>Pemprov</u> Jawa Tengah dan <u>Pemkot</u> Semarang, Ombudsman menyambut positif segala bentuk koordinasi yang telah dilakukan termasuk upaya-upaya yang telah dilakukan dalam meminimalisir dampak.

"Kami menyadari bahwa penanganan <u>banjir</u> beserta dampaknya merupakan hal yang tidak sederhana," ujarnya.

Oleh karenanya, pihak-pihak terkait harus mulai menyadari betul bahwa dalam hal ini kita tidak dapat lagi berlarut-larut dalam mengambil keputusan. Sebab keputusan, tindakan yang diambil akan sangat berpengaruh kepada <u>publik</u>.

"Ombudsman sebagai lembaga pengawas secara <u>progresif</u> akan tetap melakukan monitoring dan evaluasi, termasuk menagih komitmen penyelenggara <u>pelayanan publik</u>," pungkasnya.